

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN Sebelum dan Setelah Pemilihan Presiden di Indonesia

Refi Tria Nabila¹, Andreas Vernando^{2*}

^{1,2} Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

*Korespondensi: andreas.vernando@act.uad.ac.id

Tanggal Masuk:

09 Januari 2026

Tanggal Revisi:

12 Juli 2026

Tanggal Diterima:

24 Juli 2026

Keywords: *Presidential Elections; Profitability; State Owned Enterprises (BUMN); Tax Aggressiveness*

How to cite (APA 6th style)

Nabila, R. T., & Vernando, A. (2026). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN Sebelum dan Setelah Pemilihan Presiden di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (3), 1-9.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i3.4354>

Abstract

Accounting theory suggests that political environments affect accounting practice because the accounting numbers have social realities. Political cost hypothesis argues that firms in high media exposure tend to manage their income to minimize government intervention. In pre-election periods, government-owned enterprises tend to report the favorable accounting numbers to help incumbents who have another term to serve. Although literature documents that political events affect financial reporting, limited studies focus on the association between the presidential election and tax avoidance. Thus, this study aims to analyze the profitability and tax aggressiveness in State-Owned Enterprises (SOEs) presidential election in 2014 and 2019. In doing so, we focus on pre- and post-presidential elections to understand the different patterns between them. Pre-presidential elections are 2013 and 2018, and post-presidential elections are in 2014 and 2019. Using the Wilcoxon Signed Rank Test with Eviews software to investigate 25 SOEs (50 observations) listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during two presidential elections, this study finds that there is no significant difference in the profitability and tax aggressiveness of SOEs before and after the presidential election in Indonesia. Our study implies that presidential elections do not affect the financial behavior of SOEs in Indonesia.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peristiwa politik yang terjadi di suatu negara berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam pemerintahan, seperti sosial, ekonomi, keamanan, hukum, dan lain-lain. Salah satu dampak di bidang ekonomi adalah aktivitas keuangan perusahaan negara. Presiden Jokowi berharap pada periode pertama kabinetnya, semua masalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa selesai sehingga perusahaan negara bisa ikut mendorong geliat laju ekonomi

dalam negeri. Akan tetapi kenyataannya, kondisi perusahaan negara pada akhir kepemimpinan 5 tahun pertamanya bersama wapresnya yaitu Jusuf Kalla ternyata masih banyak yang mengalami kesulitan keuangan (CNBC, 2019). Dari banyaknya sektor pada perusahaan negara ternyata memang tidak hanya satu sektor saja yang mengalami kondisi tersebut tetapi terdapat empat sektor yang berbeda yaitu sektor jasa transportasi, sektor manufaktur, sektor jasa logistik dan sektor keuangan. Hal ini mungkin saja terjadi, karena suatu peristiwa politik dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perubahan kebijakan ekonomi atau regulasi yang mungkin mempengaruhi stabilitas perekonomian negara. Perubahan kebijakan ekonomi atau regulasi ini yang mungkin dapat mempengaruhi berbagai aspek seperti sentimen pasar yang dapat mempengaruhi harga saham serta investasi pada perusahaan BUMN, kinerja makroekonomi yang baik atau buruk yang dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas suatu perusahaan BUMN, serta perubahan manajemen dan kepemimpinan pemerintahan yang dapat mempengaruhi keputusan dan operasional suatu perusahaan BUMN.

Penelitian ini termotivasi oleh beberapa faktor. Pertama, perekonomian dapat dipengaruhi oleh jumlah biaya politik, dana kampanye, dan aktivitas ekonomi yang terkait dengan kampanye politik (Amru & Dartanto, 2014). Kedua, sebelum peristiwa politik, kondisi keuangan perusahaan BUMN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan kinerja manajemen perusahaan itu sendiri. Ketiga, dampak dari pemilihan umum ini diperkirakan dapat memengaruhi perilaku konsumsi, investasi, dan jumlah uang yang beredar dalam periode singkat (Bareksa, 2019).

Literatur mendokumentasikan bahwa peristiwa politik di daerah ataupun di nasional berdampak pada pelaporan keuangan. Berkaitan dengan peristiwa politik di daerah, bupati atau walikota berpotensi untuk mencalonkan kembali cenderung mengalami surplus anggaran dan kas (liabilitas) yang lebih rendah (tinggi) jika dibandingkan dengan bupati atau walikota yang tidak memiliki peluang untuk mencalonkan kembali (Rakhman & Saudagaran, 2023). Berkaitan dengan peristiwa politik nasional, peristiwa pemilihan presiden mempengaruhi praktik manajemen laba (Capalbo et al., 2021; Jain et al., 2021), kebijakan investasi perusahaan (Harymawan et al., 2024), nilai perusahaan (Cahyono et al., 2023), dan kinerja keuangan (Harymawan et al., 2020), penghindaran pajak (Li et al., 2022). Meskipun demikian, literatur masih terbatas yang memeriksa kinerja keuangan dan penghindaran pajak di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memajukan literatur dengan menginvestigasi apakah pemilihan presiden mempengaruhi kinerja keuangan dan penghindaran pajak di perusahaan BUMN.

Penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan bagaimana pemilihan umum mempengaruhi penghindaran pajak dengan menggunakan data dari 36 negara (Li et al., 2022). Meskipun demikian, apakah hasil penelitian sebelumnya dapat digeneralisasi ke konteks Indonesia masih menjadi pertanyaan empiris. Penelitian ini berfokus pada BUMN karena Herdianti (2014) menemukan bahwa koneksi politik di BUMN digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin kuat koneksi politik suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan melakukan tindakan penghindaran pajak. Sudaryono et al. (2019) menemukan bahwa perusahaan besar dan direksi yang mempunyai hubungan politik dengan pemerintah cenderung melakukan praktik perpajakan yang agresif.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Rerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori biaya politis untuk memprediksi hubungan antara peristiwa politik dan angka akuntansi. Masalah agensi tipe 2 antara investor mayoritas dan investor minoritas lebih mungkin terjadi di BUMN dari pada masalah agensi tipe 1 antara investor dan manajer (Fan & Wong, 2002; Jaggi et al., 2009; Villalonga & Amit, 2006). Struktur kepemilikan BUMN cenderung terkonsentrasi karena pemerintah memiliki kepemilikan minimal 50%. Kepemilikan yang terkonsentrasi ini meminimalkan konflik kepentingan antara investor dan manajer. Meskipun demikian, tipe kepemilikan ini memunculkan konflik kepentingan antara investor dan investor. Biaya agensi muncul antarinvestor karena politisi atau birokrat sebagai investor mayoritas yang mengendalikan BUMN mungkin mengekspropriasi sumber daya perusahaan yang merugikan kepentingan investor minoritas. Misalnya, Kementerian BUMN menginstruksikan BUMN untuk mendukung agenda pemerintah pada saat pemerintah memiliki kebijakan investasi yang masif (Kementerian BUMN, 2016). Oleh karena itu, beberapa BUMN mengalami kesulitan keuangan (Lisnawati, 2023) dan terdapat BUMN yang tidak mampu melunasi kewajibannya (KSEI, 2023).

Biaya politis sering direpresentasikan dengan ukuran perusahaan (Belz et al., 2019). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar perhatian pemerintah terhadap perusahaan tersebut. Perspektif biaya politis memprediksi bahwa perusahaan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah cenderung mengelola angka akuntansi yang dilaporkan untuk menghindari intervensi dari pemerintah (Watts & Zimmerman, 1990). BUMN, secara definisi, merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan pemerintah. Tidak hanya di perusahaan, angka akuntansi juga berlaku untuk menentukan keberhasilan dalam kontestasi politik. Sebelum kontestasi politik, surplus anggaran dan kas cenderung lebih rendah, dan liabilitas cenderung lebih tinggi di pemerintah daerah yang dipimpin oleh bupati atau walikota yang berpotensi untuk mencalonkan kembali daripada di pemerintah daerah yang dipimpin oleh bupati atau walikota yang tidak memiliki peluang untuk mencalonkan kembali (Rakhman & Saudagaran, 2023). Hal ini karena bupati atau walikota membutuhkan anggaran untuk menyenangkan pemilih. Senada dengan hal ini, beban pajak di BUMN juga mungkin direduksi sebelum kontestasi politik karena BUMN membutuhkan anggaran untuk mendukung salah satu pasangan calon. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa perusahaan koneksi secara politis cenderung melakukan manajemen laba karena terdapat politisi atau birokrat yang akan melindunginya (Chaney et al., 2011)

Pengembangan Hipotesis

BUMN mengalami masalah agensi tipe 2, yakni masalah agensi antara prinsipal (investor mayoritas) dan prinsipal (investor minoritas) (Jaggi et al., 2009; Villalonga & Amit, 2006). Investor mayoritas yang mengendalikan BUMN mungkin mengeksplotasi sumber daya BUMN untuk kepentingan investor mayoritas yang mengorbankan kepentingan investor minoritas. Sebagai contoh, pada saat proses kontestasi pemilihan presiden, politisi sebagai investor mayoritas di BUMN mungkin menggunakan aset BUMN untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu. Penggunaan aset ini bertentangan dengan kepentingan

investor minoritas. Oleh karena itu, sebelum pemilihan presiden, terdapat kemungkinan bahwa profitabilitas BUMN menurun yang disebabkan oleh pengeluaran BUMN meningkat untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan dan aktivitas kampanye dari salah satu pasangan calon. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa kinerja BUMN menurun di tengah periode pemilihan presiden (Harymawan et al., 2020). Dengan menggunakan data BUMN dan non-BUMN, penelitian sebelumnya menemukan bahwa ketidakpastian politik (periode pemilihan presiden) tidak memengaruhi harga saham (Cahyono et al., 2023). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yaitu:

H1: Terdapat perbedaan signifikan pada profitabilitas perusahaan BUMN sebelum dan setelah pemilihan presiden.

Menurut Mahalistian & Yuliandhari (2021), pajak merupakan sumber pendapatan negara sehingga jika perusahaan melakukan penghindaran pajak atau melaksanakan agresivitas pajak menunjukkan bahwa perusahaan kurang berkontribusi untuk negara. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan guna untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Karena pajak penghasilan perusahaan akan diterapkan berdasarkan seberapa besar pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Dalam hal ini manajemen berkepentingan untuk menunjukkan kinerja suatu perusahaan yang dikelola melalui tingkat profitabilitas yang tinggi, meskipun hal tersebut dapat mengakibatkan pembayaran pajak yang tinggi (Sudaryono et al., 2019). Herdianti (2014) menyatakan bahwa, ketika suatu perusahaan memiliki lebih banyak koneksi politik, maka lebih cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Sudaryono et al. (2019) menunjukkan bahwa perusahaan besar dan direksi yang mempunyai hubungan politik dengan pemerintah cenderung melakukan praktik perpajakan yang agresif.

Hipotesis 1 sebelumnya menduga bahwa BUMN mengalami pengeluaran yang meningkat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu, yang pada akhirnya hal ini menurunkan profitabilitas BUMN. Karena bonus dan karir dari manajemen perusahaan ditentukan oleh profitabilitas yang dihasilkan, terdapat kemungkinan bahwa manajemen mungkin melakukan penghindaran pajak secara agresif sebelum pemilihan presiden dalam rangka untuk menurunkan beban yang bertambah akibat beban operasional BUMN yang bertambah untuk mendukung salah satu pasangan calon. Pemilihan presiden meningkatkan biaya politik, yang mendorong BUMN untuk melakukan manajemen laba untuk meningkatkan laba yang dilaporkan (Capalbo et al., 2021). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa ketidakpastian politik meningkatkan perilaku penghindaran pajak (Li et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis dua yakni:

H2: Terdapat perbedaan signifikan pada agresivitas pajak perusahaan bumh sebelum dan setelah pemilihan presiden.

METODE PENELITIAN

Sampel dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sampel BUMN yang terdaftar dan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan tiga kriteria pemilihan sampel yakni BUMN yang terdaftar di BEI dari tahun 2013 sampai 2019 dan tersedia data keuangan secara lengkap.

Penelitian ini berfokus pada pemilu tahun 2014 dan 2019 karena pemilihan umum tahun 2014 dapat mewakili perpindahan kekuasaan (dari Partai Demokrat ke Partai Demokrasi Perjuangan) dan tahun 2019 dapat mewakili keberlanjutan kekuasaan (pemerintah tetap dipimpin oleh Partai Demokrasi Perjuangan).

Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni profitabilitas dan agresivitas pajak. Profitabilitas diukur dengan laba dibagi dengan total aset. Agresivitas pajak diukur dengan rasio beban pajak tahun berjalan dibagi dengan laba sebelum pajak. Dua variabel ini dibandingkan sebelum dan setelah periode pemilihan presiden untuk menguji hipotesis.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan profitabilitas dan perilaku penghindaran pajak di BUMN sebelum dan setelah pemilihan presiden. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan alat analisis uji beda dua sampel yang berpasangan (*paired-sample t tests*). Sebelum melakukan perbandingan dengan alat analisis, penelitian ini menguji asumsi normalitas terlebih dahulu. Ketika asumsi normalitas terpenuhi, penelitian ini menggunakan uji t dengan sampel yang berpasangan, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis non-parametrik yakni *Wilcoxon signed rank test* jika asumsi normalitas tidak terpenuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan hasil statistik deskriptif, uji normalitas dan uji *Wilcoxon signed rank*. Nilai rata-rata dan nilai median untuk profitabilitas ketika sebelum pemilihan presiden masing-masing sebesar 0,061 dan 0,046. Setelah pemilihan presiden, variabel profitabilitas menunjukkan nilai rata-rata sejumlah 0,044 dan nilai median sejumlah 0,035. Lebih lanjut, hasil uji normalitas dengan menggunakan uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque Berra menunjukkan bahwa nilai profitabilitas sebelum pemilihan presiden kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Wilcoxon signed rank test* untuk menguji H1. Meskipun nilai median dari variabel profitabilitas mengalami penurunan setelah pemilihan presiden, nilai probabilitas (0,343) dari uji *Wilcoxon signed rank* lebih dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa profitabilitas di BUMN tidak berbeda secara signifikan antara sebelum dan setelah pemilihan presiden. Oleh karena itu, H1 tidak diterima.

Meskipun hasil ini berarti bahwa profitabilitas BUMN tidak dipengaruhi oleh pemilihan presiden seperti yang dihipotesiskan. Perubahan yang terjadi pada profitabilitas setelah pemilihan presiden mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dalam hal ini terdapat penurunan profitabilitas setelah pemilihan presiden menunjukkan bahwa walaupun ada indikasi perubahan perilaku manajemen setelah pemilihan presiden, hal ini belum cukup berdampak secara substansial pada kinerja keuangan perusahaan BUMN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kurniasari, 2019), yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan data dari Malaysia yang menemukan bahwa

terdapat perbedaan kinerja perusahaan yang terafiliasi ke pemerintah sebelum dan setelah peristiwa pemilihan umum (Fung et al., 2015). Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menemukan pemilihan kongres di Amerika Serikat menjadi penjas terhadap imbal hasil taknormal yang lebih tinggi di perusahaan yang berdonasi ke pemenangan (Akey, 2015).

Tabel 1.
Hasil Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, dan Uji Wilcoxon Signed Rank

Variabel	Statistik Deskriptif					Uji Jarque Berra	Uji Wilcoxon Signed Rank
	Periode	N	Rerata	Median	Dev. Std.	Nilai Probabilitas	Nilai Probabilitas
Profitabilitas	Sebelum	50	0,061	0,044	0,070	0,000	0,343
	Setelah	50	0,046	0,035	0,075	0,412	
Agresivitas Pajak	Sebelum	50	0,085	0,225	0,747	0,000	0,761
	Setelah	50	0,958	0,227	5,219	0,000	

Sumber: *Output Eviews 12*, diolah (2024)

Untuk pengujian agresivitas pajak, nilai rata-rata untuk variabel agresivitas pajak ketika sebelum pemilihan presiden sejumlah 0,085. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai rata-rata variabel agresivitas pajak setelah pemilihan presiden (0,958). Sejalan dengan hal ini, nilai median untuk variabel agresivitas pajak juga mengalami peningkatan setelah pemilihan presiden. Nilai agresivitas pajak sebelum pemilihan presiden sejumlah 0,225 dan setelah pemilihan presiden sebesar 0,227. Lebih lanjut, hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque Berra menunjukkan bahwa nilai agresivitas sebelum dan setelah pemilihan presiden kurang dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa data berdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Wilcoxon signed rank test* untuk menguji H2. Hasil pengujian *Wilcoxon signed rank* menunjukkan nilai probabilitas untuk agresivitas pajak sebesar 0,761 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, H2 tidak terdukung.

Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada Agresivitas Pajak Perusahaan BUMN sebelum dan setelah pemilihan presiden. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik mempunyai nilai ETR yang lebih besar, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih patuh sebagai pembayar pajak (Putra & Suhardianto, 2020). Perubahan kondisi politik yang diwakili oleh pemilihan presiden pada kinerja keuangan Perusahaan tidak cukup memberikan bukti yang signifikan secara statistik terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan BUMN. Artinya, perubahan politik yang ditandai dengan pemilihan presiden tidak memiliki dampak yang berarti pada tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh perusahaan. Walaupun pemilihan presiden seringkali membawa perubahan dalam kebijakan pemerintah, kemungkinan kebijakan pajak yang berlaku selama periode ini relatif stabil, atau perusahaan memiliki kebijakan internal yang konsisten dalam manajemen pajak mereka, sehingga perubahan lingkungan politik tidak berpengaruh signifikan.

Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa tingkat agresivitas pajak cenderung menurun setelah pemilihan presiden dibandingkan sebelum pemilihan presiden, tetapi hasil ini tidak

signifikan secara statistik karena meskipun tingkat agresivitas pajak cenderung menurun setelah pemilihan presiden ini tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa adanya pemilihan presiden atau tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak yang menandakan bahwa penurunan tingkat agresivitas pajak bersifat sementara dan bukan merupakan tren yang konsisten setelah pemilihan presiden. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang menggunakan data dari 36 negara (Li et al., 2022) yang menemukan bahwa peristiwa pemilihan presiden meningkatkan penghindaran pajak seiring meningkatkan ketidakpastian kebijakan dari pemimpin yang nantinya terpilih. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang menggunakan data dari Indonesia (Herdiandi, 2014; Sudaryono et al., 2019; Iswari et al., 2019) yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau semakin agresif.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan dan agresivitas pajak di perusahaan BUMN sebelum dan setelah pemilihan presiden di Indonesia. Penelitian menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada profitabilitas dan agresivitas pajak di BUMN sebelum dan setelah pemilihan presiden di Indonesia.

Implikasi dari hasil penelitian ini memberikan kesan bahwa biaya agensi yang diprediksi oleh teori agensi akan meningkat ketika pemilihan presiden tidak terbukti secara empiris. Pemegang saham mayoritas di BUMN tidak terbukti melakukan ekspropriasi ke pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, regulator dan pemangku kepentingan lainnya tidak perlu khawatir terhadap potensi eksploitasi sumber daya BUMN sebelum pemilihan presiden di Indonesia.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini sebaiknya dipahami dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan dari penelitian ini. Penelitian ini hanya mencakup periode waktu tertentu, sebelum pemilihan presiden pada tahun 2013 dan 2018 dan setelah pemilihan presiden yaitu pada tahun 2014 dan 2019 sehingga mungkin tidak cukup untuk menangkap perubahan jangka panjang dalam kinerja keuangan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kelengkapan atau akurasi. Variabilitas antarsektor BUMN, perbedaan karakteristik antar sektor industri bisa saja dapat bereaksi berbeda terhadap pemilihan presiden. Pengaruh eksternal lain yang tidak dimasukkan yang mungkin bisa mempengaruhi kinerja Perusahaan BUMN.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memeriksa kinerja keuangan dan agresivitas pajak di peristiwa politik dengan mempertimbangkan kualitas auditor sebagai variabel pemoderasi. Kualitas auditor mungkin memainkan peran dalam menentukan kinerja dan agresivitas pajak. Misalnya, kinerja keuangan BUMN sebelum pemilihan presiden tidak mengalami penurunan yang diakibatkan BUMN digunakan untuk mendanai agenda politik karena BUMN tersebut diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akey, P. (2015). *Valuing Changes in Political Networks: Evidence from Campaign Contributions to Close Congressional Elections*. 2003. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhv035>
- Amru, A. F., & Dartanto, T. (2014). Dampak Pemilihan Umum 2014 terhadap Indikator Makroekonomi. *LPEM FEUI Brief*, 1, 1–5.
- Bareksa. (2019). *Schroders : Aliran Modal Asing akan Terus Masuk Pasca Pemilu, Pantau Sektor Ini*. Bareksa.Com.
- Belz, T., Hagen, D. Von, & Steffens, C. (2019). Taxes and firm size: Political cost or political power? *Journal of Accounting Literature*, 42, 1–28. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.12.001>
- Cahyono, S., Fernando, H. A., & Primasatya, R. D. (2023). The Nexus between Corporate Financial Ratio and Price Earnings Performance : Evidence from President Election Period in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 25(2), 101–116.
- Capalbo, F., Lupi, C., Smarra, M., & Sorrentino, M. (2021). Elections and earnings management : evidence from municipally-owned entities. *Journal of Management and Governance*, 25(3), 707–730. <https://doi.org/10.1007/s10997-020-09523-z>
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51, 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- CNBC. (2019). *4 BUMN ini Dihajar Sederet Masalah di Periode Pertama Jokowi*. CNBC Indonesia.
- Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2002). Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia. *Journal of Accounting and Economics*, 33(3), 401–425. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(02\)00047-2](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(02)00047-2)
- Fung, S. Y. K., Gul, F. A., & Radhakrishnan, S. (2015). Accounting , Organizations and Society Corporate political connections and the 2008 Malaysian election. *Accounting, Organizations and Society*, 43, 67–86. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2015.04.001>
- Harymawan, I., Abdillah, S. P., & Nasih, M. (2024). Does CEO Managerial Ability Impacts on Corporate Investment Decisions ? The Case of Economic Uncertainty in Political Election Periods. *Asian Journal of Business and Accounting*, 17(2), 281–320.
- Harymawan, I., Nasih, M., Suhardianto, N., & Shauki, E. (2020). How does the presidential election period affect the performance of the state-owned enterprise in Indonesia? *Cogent Business & Management*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1750330>
- Herdianti, E. P. (2014). Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan yang Mempunyai Koneksi Politik. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 2(2), 35–43.
- Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). *Political connection and tax aggressiveness : A study on the state- owned enterprises registered in Indonesia stock exchange*. 12, 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5>
- Jaggi, B., Leung, S., & Gul, F. (2009). Family control, board independence and earnings management: Evidence based on Hong Kong firms. *Journal of Accounting and Public Policy*, 28(4), 281–300. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.06.002>
- Jain, A., Jackson, D., & Sakaki, H. (2021). Political, economic, financial uncertainty, and real earnings management. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 32(2), 52–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jcaf.22485>
- KSEI. (2023). *Penundaan Pembayaran Bunga Ke-11 Obligasi Berkelanjutan IV Waskita*

- Karya Tahap I Tahun 2020 (WSKT04CNI)*. Kustodian Sentral Efek Indonesia. https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/154202_ksei_1184_dir_0523_202305051629.pdf
- Kurniasari, S. (2019). Pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan publik sebagai variabel moderasi artikel ilmiah. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*.
- Kementerian BUMN. (2016). *Laporan Tahunan Kementerian BUMN Tahun 2016*.
- Li, Q., Maydew, E. L., Willis, R. H., & Xu, L. (2022). Corporate tax behavior and political uncertainty: Evidence from national elections around the world. *Journal of Business Finance & Accounting*, 49(9–10), 1605–1641. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jbfa.12605>
- Lisnawati. (2023). Permasalahan Utang Bumh Karya Dan Upaya Mengatasinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 15(9), 11–15.
- Mahalistian, I., & Yuliandhari, W. S. (2021). Slack Resources Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.893>
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 82–90. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.82-90>
- Rakhman, F., & Saudagaran, S. (2023). The effect of political budget cycle on local governments' financial statements in a young democracy. *Public Money and Management*, 43(5), 512–520. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2173369>
- Sudaryono, E. A., Rahmawati, Djuminah, Wartono, & Widarjo, W. (2019). Relationship of political connection and tax aggressiveness: Empirical evidence from Indonesia. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 12(5), 453–465. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2019.104636>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: A ten year perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.
- Villalonga, B., & Amit, R. (2006). How do family ownership, control and management affect firm value? *Journal of Financial Economics*, 80(2), 385–417. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.12.005>